

MEDIA MASSA DALAM MASYARAKAT PLURALIS

Pawito

Jurusan Ilmu Komunikasi

FISIP Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstract

This study attempts to scrutinize how mass media deal with pluralistic society and culture. Some cases found in USA, England, and Australia are primarily examined first. The study then goes further to explore extensively what and how mass media in Indonesia deals with the issue of pluralistic society and culture. The study suggests that Indonesia's mass media deal with this issue in a dynamic term from the period of New Order to post-reformation period.

Keywords : *Mass media, pluralistic society.*

Pendahuluan

Kenyataan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari bermacam-macam kelompok etnis yang kemudian membawa konsekuensi keragaman budaya. Pemberian apresiasi yang tinggi terhadap keragaman etnis dan budaya karena itu menjadi hal yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Dalam hubungan ini media massa dapat berperan dalam membantu upaya apresiasi ini demi tetap menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Kendati demikian, sesuatu yang sering muncul adalah keluhan bahwa apresiasi yang ada seringkali cenderung tidak memadai. Media massa terkesan lebih banyak mengejar kepentingannya sendiri terutama yakni meraih rating dan/atau peningkatan pemasukan iklan dibanding dengan banyak berpartisipasi dalam upaya ini. TVRI dapat dikatakan menjadi tumpuan harapan dalam hal ini karena TVRI merupakan bentuk lembaga penyiaran public (*public broadcasting television*). Akan tetapi TVRI sejauh ini mengalami banyak kendala terutama bersumber pada persoalan teknologi.

Kajian ini mengambil titik berat bagaimana pada kenyataannya media massa bekerja dalam konteks masyarakat pluralis. Setelah contoh-contoh kasus yang terjadi di berbagai masyarakat/negara lain ditunjukkan maka kajian diarahkan kepada apa yang terjadi di Indonesia. Peneliti men-

cermati berbagai tayangan televisi serta media cetak surat kabar dan majalah untuk kepentingan ini. Analisis media digunakan untuk sampai pada kesimpulan bersifat interpretif terhadap sajian-sajian media khususnya yang berkenaan dengan yang terjadi di Indonesia.

Masyarakat Pluralis dan Media Massa

Media massa dalam masyarakat pluralis (secara etnis dan budaya) menghadapi beberapa tantangan, baik dalam hal penyebar-luasan informasi kepada khalayak (berita) maupun dalam hal penumbuhan citra (*image building*). Dengan kedua muatan ini (informasi dan citra) media massa bekerja dan mengembangkan wacana. Dalam hubungan ini pengembangan wacana oleh media massa dapat diamati melalui cara-cara bagaimana bentuk-bentuk isi media seperti berita, film, soap opera, musik, sinetron, dan laporan perjalanan dikemas ke dalam konstruksi tertentu yang dalam konteks masyarakat pluralis melibatkan berbagai persoalan penting seperti suku bangsa, budaya, dan agama.

Gray (2002:439-461) dalam kaitan ini menawarkan tiga jenis karakter wacana yang dapat dikembangkan oleh media massa dalam masyarakat pluralis, terutama media televisi, yakni meliputi *asimilasi*, *pluralis*, dan *multikulturalisme*. Pengembangan wacana dengan karakter

asimilasi pada dasarnya menempatkan isu-isu sensitif seperti suku, agama, dan budaya sebagai persoalan individu yang tidak seharusnya memperoleh penonjolan di media massa. Persoalan-persoalan yang lebih bersifat politis dan kompleks berkenaan dengan hal-hal di atas serta hal-hal lain seperti gender dan kelompok-kelompok kekuatan dalam masyarakat ditempatkan sebagai produk prasangka sosial (*prejudice*) dan egoisme sosial. Muatan isi media yang mengembangkan wacana dengan karakter asimilasionis, seperti dikatakan oleh Gray, biasanya kental bernuansakan “*marginalization of social and cultural difference in the interest of shared and universal similarity*” (marginalisasi perbedaan karakter sosial dan kultural seraya mengedepankan persamaan-persamaan yang ada serta karakter universal). Isi media yang lebih mempromosikan asimilasi, karena itu, biasanya dikonstruksi dengan memberikan penonjolan terhadap lambang-lambang serta simbol-simbol yang menandai kesamaan dan/atau sifat universal serta mengelakkan signifikasi perbedaan ras dan/atau warna kulit serta perbedaan-perbedaan lainnya.

Sangat berbeda dengan asimilasi, isi media yang memiliki orientasi lebih mengembangkan wacana dengan karakter pluralis (*separate-but-equal*) justru sangat ditandai oleh penonjolan terhadap perbedaan yang ada, terutama suku bangsa (*race*), sebagai basis dari adanya perbedaan budaya yang ada. Perbedaan ini dinyatakan secara eksplisit sebagai hal yang memang berbeda yang karenanya seharusnya diterima sebagai suatu kewajaran. Kalangan pendukung wacana pluralis pada umumnya berpandangan bahwa kalau memang keanekaragaman etnis dan budaya diakui sebagai sesuatu yang memang ada maka tidak selayaknya media massa menutup-nutupi kenyataan ini dan selayaknya memberikan apresiasi terhadapnya dengan memberikan tempat secara wajar bagi semua etnis dan budaya yang ada. Kendati demikian, sebagaimana karakter wacana asimilasi, muatan media dalam karakter pluralis ini seringkali dikritik sebagai cenderung mengabaikan konteks sosial dan historik di dalam mana perbedaan-perbedaan dinyatakan, dipertahankan, dan dianggap penting atau bermakna.

Isi media dengan karakter lebih banyak mengembangkan wacana *multikulturalisme* dalam pada itu sangat menonjolkan konstruksi dan positioning nilai-nilai sosial dan nilai-nilai budaya berbagai kelompok etnik yang ada. Nilai-nilai universal seperti mobilitas sosial, individualisme, dan pemberian semacam “*privilege*” terhadap kelas menengah kalangan-kalangan yang dianggap minoritas (atau mungkin dimarginalkan) lebih memperoleh tempat dalam tayangan dengan karakter multikulturalisme. Perihal yang bersifat ideal dari golongan (etnis dan budaya) yang memegang hegemoni justru cenderung tidak memperoleh penonjolan.

Konsep multikulturalisme (*multiculturalism*) mulai banyak digunakan terutama menjelang akhir dekade 1980-an untuk menunjuk jenis tertentu dari kemajemukan budaya (*cultural pluralism*), yakni kemajemukan budaya yang lebih memberikan penekanan kepada kecenderungan inklusif serta pemberdayaan kelompok-kelompok minoritas dalam segala aspek kehidupan. Berbeda dengan kemajemukan budaya yang didengungkan di awal abad ke-20 oleh sebagian kalangan sosiolog Barat demi merespon membanjir serta berkembangnya kaum pendatang (*migrant*), paham multikulturalisme dikembangkan oleh para aktivis budaya minoritas untuk membenahi pola-pola eksklusif dan tidak adil yang banyak terjadi di berbagai belahan dunia (Repstein, 1998:599-602; Greebaum, 1994:1179-1187).

Dalam kaitan ini pemberian penekanan terhadap inklusifitas serta pemberdayaan kelompok minoritas mengimplikasikan kecenderungan sikap-sikap serta perilaku akomodatif pada kelompok-kelompok etnis dan/atau budaya yang berbeda-beda dalam suatu kebersamaan wadah dan kerangka negara-bangsa (*nation state*). Akomodasi (*accommodation*) karena itu merupakan kata kunci dalam multikulturalisme. Di dalam banyak kenyataan empirik, implementasi kebijakan politik terkait dengan upaya mendorong proses-proses akomodasi yang lembut (*smooth*) nyaris senantiasa menghadapi kendala-kendala yang terutama bersumber pada kecenderungan hegemonik dari atau oleh kelompok etnis dan/atau kultur yang dominan di satu sisi serta kecemburuan (*prejudice*) oleh kelompok etnis dan budaya yang

termarginalkan di sisi lain. Media massa dalam kaitan ini seringkali, walau tidak selalu, terjebak pada bias kelompok dominan dalam mengamplifikasi peristiwa atau isu-isu yang melibatkan sensitifitas perbedaan etnik dan budaya.

Kasus di Beberapa Negara

Kasus di Amerika

Gray (2002:452-454) mengamati bahwa berbagai tayangan televisi Amerika jarang sekali, walaupun harus dikatakan ada, yang berisi kritik terhadap kalangan pemegang hegemoni warga kulit putih. Warga Amerika kulit berwarna, terutama warga kulit hitam, nyaris selalu ditempatkan sebagai fihak yang salah dan jahat. Dalam hubungan ini, tayangan seperti *The Cosby Show*, misalnya, terkesan lebih merupakan upaya mempromosikan nilai-nilai ideal mengenai Amerika dan/atau bagaimana selayaknya menjadi orang Amerika dan hal ini berbeda jauh dengan realitas yang ada dalam kehidupan sehari-hari di Amerika. Terdapat kesan dalam hubungan ini bahwa *The Cosby Show* lebih memberi penekanan pada wacana asimilasi dibandingkan dengan pluralis atau multikulturalisme.

Sudah sangat sering dikemukakan pandangan kritis terhadap film-film produksi Amerika bahwa pahlawan (hero) nyaris senantiasa dibawakan oleh orang kulit putih yang berhadapan dengan musuh (enemy) yang dibawakan oleh orang kulit hitam yang berperan sebagai penjahat yang akhirnya dihancurkan/dikalahkan oleh hero kulit putih. Banyak film yang dibintangi baik oleh Arnold Schwarzenegger maupun Sylvester Stallone menggambarkan hal demikian. Dalam kaitan ini menarik sekali untuk dikemukakan pengamatan Alvarado (1987) sebagaimana dikutip oleh Jones dan Jones (1999:122) bahwa kalangan minoritas kulit hitam di Amerika nyaris senantiasa dipandang sebagai orang aneh oleh orang-orang kulit putih. Acara ritual orang-orang kulit hitam, cara berpakaian, bahasa, menu makanan, serta artefak mereka cenderung dipandang eksotik dan tidak dipandang sebagai bagian dari kompleksitas keragaman budaya masyarakat atau bangsa Amerika. Media massa di Amerika cenderung mengekalkan pandangan demikian terutama karena media massa di sana pada umumnya dimiliki

oleh orang-orang kulit putih.

Kasus di Inggris

Sebagaimana masyarakat Amerika, masyarakat Inggris terbangun dengan karakter pluralitas etnik dan budaya yang sangat beragam: orang kulit putih Anglo Saxon, orang-orang migran dan/atau keturunan dari Asia (terutama India dan Pakistan), orang-orang kulit hitam dari Afrika, dan sebagian dari kawasan lain termasuk Timur Tengah. Hal demikian secara signifikan menghadapkan masyarakat Inggris secara keseluruhan pada persoalan pluralitas etnis dan budaya yang, setidaknya untuk beberapa hal, Inggris nampaknya lebih berhasil dibandingkan dengan Amerika. Sikap-sikap akomodatif nampaknya lebih menonjol di Inggris ketimbang di Amerika yang sangat dikenal mengedepankan penggunaan kekuatan militer untuk mencapai penyelesaian konflik. Kecenderungan akomodatif ini nampak misalnya dengan dibukanya Puri Windsor (tempat kediaman Ratu Inggris) untuk kepentingan sholat dan membaca al-Qur'an selama bulan Ramadhan 1427H (Jawa Pos, 4 Oktober 2006:1).

Kendati demikian menarik sekali studi yang dilakukan oleh Richardson (2001:221-242) yang menemukan kenyataan bahwa secara umum pers di Inggris sangat ditandai oleh tidak munculnya pemberitaan tentang orang-orang muslim kecuali orang-orang muslim yang melakukan tindak kejahatan. Kemudian walaupun orang muslim di Inggris muncul dalam pemberitaan yang berkonotasi positif maka orang-orang muslim ini biasanya hanya ditampilkan sebagai partisipan saja dan bukan sebagai sumber pokok pemberitaan. Temuan Richardson selanjutnya adalah bahwa isu-isu serta minat-minat kalangan muslim di Inggris nyaris tidak pernah menjadi agenda bagi pemberitaan pers. Kenyataan demikian membuktikan bahwa dalam tingkat masyarakat kecenderungan-kecenderungan akomodatif lebih sulit terjadi dibandingkan dengan di tingkat pemerintah, setidaknya yang menyangkut beberapa hal.

Kenyataan lain yang terjadi di Inggris adalah bahwa baik film komedi Mr Bean maupun film James Bond yang diproduksi begitu banyak (berseri-seri) ternyata relatif jarang, walaupun

seringkali ada, melibatkan tokoh penting yang diperankan oleh orang bukan kulit putih.

Kasus Australia

Ada kesan kuat bahwa dalam konteks yang terjadi di Australia, khususnya di tingkat masyarakat, multikulturalisme yang dikembangkan terkesan lebih berorientasi pada orang kulit putih Eropa (white European Anglo Saxon). Tayangan televisi baik film, soap opera, maupun musik sangat kelihatan didominasi oleh orang-orang kulit putih walaupun SBS lebih bervariasi dibandingkan televisi lain bahkan termasuk ABC sekalipun yang merupakan public broadcasting television. Kepentingan golongan etnis lain seperti Asia (misalnya China dan India) terkesan kurang memperoleh amplifikasi media massa, kecuali barangkali televisi SBS. Upaya-upaya mengangkat budaya aborigin, walaupun harus dikatakan ada, dapat dikatakan bersifat bias peran dan/atau kepentingan golongan kulit putih.

Memang terdapat advokasi terhadap golongan etnis minoritas di Australia; akan tetapi ketika terjadi konflik maka amplifikasi media yang nampak lebih menonjol adalah pembelaan oleh dan untuk kalangan kulit putih yang memegang hegemoni. Modus dari upaya menyembunyikan isu-isu sensitif berupa konflik kepentingan yang melibatkan etnis kulit putih yang mayoritas dengan etnis minoritas (termasuk aborigin) biasanya berupa tayangan tentang apa (baca: jasa-jasa) yang telah dilakukan oleh orang-orang kulit putih di masa lampau dan di masa sekarang. Ketika isu "the stolen generation" meledak di tahun 2000, misalnya, debat publik memang difasilitasi oleh media massa, termasuk pers. Kendati demikian senantiasa ada pembenaran bagi langkah-langkah yang dilakukan oleh kalangan kulit putih walaupun memang tidak ada amplifikasi yang mempersalahkan kalangan aborigin.

SBS menyiarkan paket tayangan *Global Village* yang berisi semacam laporan perjalanan atau film dokumenter mengenai berbagai ragam budaya yang unik yang terdapat di berbagai belahan dunia. Dapat dikatakan bahwa tayangan ini memiliki nilai fungsional memberikan cakrawala pemahaman (*understanding*) terhadap keanekaragaman etnis dan budaya berbagai masyarakat

di berbagai belahan dunia karena memang mengangkat atau memberikan amplifikasi berbagai kelompok etnik dan budaya masyarakat di berbagai penjuru dunia. Kendati demikian tayangan ini kadangkala terkesan merepresentasikan sisi-sisi keterbelakangan etnik dan budaya yang ditayangkan sehingga tayangan ini kerap kali terkesan mirip dengan catatan perjalanan orang-orang Barat di abad ke- 17 sampai 19 ketika mereka berlayar menjelajah dan kemudian menjajah dunia Timur termasuk Indonesia.

Kasus Indonesia

Perkembangan-perkembangan yang ada/ terjadi di Indonesia menunjukkan kecenderungan dinamis dari waktu ke waktu. Ada suatu periode di mana media massa terkesan sangat sensitif terhadap perbedaan-perbedaan yang menyangkut suku, ras dan agama yakni terutama di masa Orde Baru. Pada periode ini pemberitaan media massa dan/atau penyiaran paket hiburan yang memiliki nuansa konflik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) tidak diperkenankan. TVRI sebagai lembaga penyiaran yang menjadi tumpuan mengawal ideologi pembangunan dengan basis persatuan dan kesatuan bangsa secara konsisten bertindak sebagai aparatus ideologi pemerintah yang banyak menyiarkan aneka ragam budaya yang terdapat di seluruh penjuru tanah air, terutama musik dan tari. Paket sinetron yang disiarkan oleh TVRI seperti *Sayekti dan Hanafi* merupakan paket acara hiburan yang sangat menarik ketika ini dan juga *Sengsara Membawa Nikmat* yang kendati memiliki nuansa mengangkat nilai-nilai keutamaan tertentu (ketabahan dan keikhlasan) namun jelas tidak disertai dengan penggambaran konflik bernuansa SARA. Kemudian acara *Varia Nusantara sebuah* acara siaran kata (berita RRI) secara signifikan mengupayakan penyebarluasan informasi pembangunan dari dan ke seluruh penjuru tanah air.

Kendati demikian sampai tahap ini TVRI dan juga RRI seringkali justru dikesankan lebih sebagai corong pemerintah sekaligus alat hegemoni etnis dan budaya dominan yakni etnis dan budaya Jawa. Paket acara wayang kulit, wayang orang, ketoprak, dan pentas lawak Srimulat, misalnya, seringkali ditunjuk sebagai ikon hegemoni

termaksud. Seiring dengan tumbuhnya stasiun televisi swasta seperti RCTI, Indosiar, SCTV, TPI, dan TransTV di akhir dekade 1980-an maka paket acara televisi semakin beragam dan dengan sendirinya menciptakan iklim kompetisi yang semakin ketat yang berdampak antara lain semakin mudarnya peran-peran dan pengaruh TVRI.

Kemudian ketika menginjak periode Reformasi maka segalanya lalu menjadi leluasa sehingga pemberitaan media massa, terutama sekali media cetak, mengenai konflik antar etnik di Kalimantan yang melibatkan suku Dayak dan Madura begitu vulgar termasuk pemuatan foto-foto korban mutilasi. Pada periode ini TVRI (dan juga RRI) cenderung mengambil posisi tidak berseberangan dengan pemerintah, tetapi sekaligus juga berusaha untuk tidak terkesan melulu menjadi pembela pemerintah, dalam menyiarkan berbagai paket acara berita dan hiburan. Dalam kaitan ini paradigma pemikiran yang dianut adalah tetap menjunjung tinggi tugas menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sehingga relatif berhati-hati dalam memberitakan kasus-kasus konflik.

Berkenaan dengan paket hiburan dan acara lain dalam kaitan dengan pluralitas etnis dan budaya TVRI mengupayakan reaktualisasi kemajemukan secara lebih proporsional. Dalam kaitan ini kecenderungan terlalu berkarakter asimilasi cenderung dikurangi serta kemudian diupayakan penambahan unsur-unsur yang bernuansa pluralis dan kadangkala juga multikulturalis. Hal demikian nampak misalnya melalui amplifikasi yang ekstensif terhadap budaya daerah di luar Jawa sementara tayangan wayang kulit, ketoprak, dan wayang orang dikurangi. Stasiun televisi swasta dalam pada itu memiliki keleluasaan yang nyaris mutlak dalam penayangan berbagai paket acara bahkan juga acara berita. Tayangan talkshow sejak pengunduran diri Presiden Suharto 21 Mei 1998 sangat diwarnai dengan kritik dan kecaman terhadap penguasa, sementara paket hiburan banyak diisi dengan pemutaran film-film asing (kebanyakan film yang sarat dengan nuansa kekerasan) serta paket acara produksi asing atau tiruannya dengan aneka ragam jenis (*genre*) termasuk *reality show* dan *quiz*.

Namun demikian hal ini tidak berarti bahwa paket tayangan produksi dalam negeri tidak

memperoleh tempat. Banyak sinetron produksi dalam negeri dicoba kembangkan kendati kerap kali terkesan kering dengan nuansa edukasi dan sebagian lagi banyak televisi swasta menyiarkan paket acara film layar lebar seperti *Warkop*, *Nyai Blorong*, dan *Sundel Bolong*. Paket sinetron *Keluarga Cemara*, *Bajaj Bajuri*, *Kiamat Sudah Dekat*, dan *Demi Waktu* boleh dikatakan merupakan paket tayangan hiburan yang tergolong berhasil. Kemudian nampak isyarat bahwa unsur-unsur dalam karakter pluralis dan multikulturalis semakin memperoleh penonjolan pada berbagai paket acara hiburan belakangan ini seperti misalnya sinetron *Si Entong*, *Emak Gue Jagoan*, dan paket tayangan sekitar tahun baru Imlek termasuk kesenian barongsai.

Dalam pada itu penayangan *Megalitikum Kwantum* (TV 7) merupakan langkah besar karena ia merupakan karya yang bersifat avangarde berupa pentas musik dan tari super-kolosal. Pentas dan penayangan *Megalitikum Kwantum* 2005 ini dirancang dengan maksud untuk menggugah optimisme dan semangat kebangsaan dengan menampilkan secara harmonis musik dan tari yang pernah berkembang di seluruh penjuru tanah air secara lintas waktu sebagai kekayaan budaya bangsa. Pentas budaya *Megalitikum Kwantum* 2005 ini dengan demikian dapat diharapkan membawa dampak tumbuhnya rasa optimis seluruh warga bangsa dalam menatap masa depan untuk kehidupan yang lebih baik (Sukardi Rinakit (2005:7).

Sebagai suatu lembaga penyiaran publik TVRI nampaknya memang memikul tugas berat: mempromosikan keragaman etnis dan budaya demi memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa sekaligus juga harus bersaing dengan lembaga penyiaran privat (*private broadcasting television*). Blumer dan Hoffmann-Reim (2002:201-210) dalam kaitan ini menyarankan bahwa peran baru lembaga penyiaran publik (*public boardcasting*) selayaknya bertolak dari pertimbangan-pertimbangan prioritas ketika harus berkompetisi dengan lembaga penyiaran komersial.

Dalam kaitan ini terdapat tiga level prioritas yang selayaknya dipertimbangkan, yakni prioritas jenis acara, target khalayak, dan prioritas-prioritas kualitatif lainnya. Prioritas program yang menjadi

pertimbangan bagi lembaga penyiaran publik adalah kalau televisi komersial lebih memilih prioritas acara-cara hiburan dan berita-berita yang topikal maka televisi publik selayaknya memprioritaskan jenis acara dokumenter, pendidikan, pentas seni, dan ilmu pengetahuan. Kelemahan pemilihan prioritas ini terletak pada kurangnya pemenuhan kebutuhan khalayak akan hiburan sementara khalayak menonton televisi pada umumnya untuk kepentingan memperoleh hiburan.

Prioritas target mempertimbangkan perihal siapa sebenarnya yang lebih hendak dituju dengan penyiaran-penyiaran yang diselenggarakan; kalau televisi swasta lebih memprioritaskan acara-acara yang membutuhkan appeal terhadap khalayak luas terutama sehubungan dengan acara-acara yang disertai iklan atau sponsor maka televisi publik dapat memilih prioritas target kalangan minoritas. Amplifikasi terhadap budaya Tionghwa dan Arab di samping unsur-unsur budaya berbagai etnis kepulauan di Indonesia sudah tentu menjadi kebutuhan mendesak. Prioritas target ketiga, yakni mempertimbangkan prioritas selain dua hal di atas yang pada dasarnya memilih dengan pertimbangan kultivasi dan reputasi bagi asesibilitas terhadap minat-minat dan kebutuhan-kebutuhan publik. Hal ini berarti, untuk konteks Indonesia juga meniscayakan pemberian ekspose secara relatif proporsional terhadap budaya dominan karena televisi publik jelas bukan media komunitas dan juga bukan aparatus ideologi untuk kelompok-kelompok perlawanan.

Kesimpulan

Sebagai catatan penutup dikemukakan penegasan di sini bahwa ke depan media massa di Indonesia harus menemukan format ideal bagi komposisi muatan atau isi media (media content) kalau memang bermaksud hendak mengambil tanggungjawab membantu memperkokoh kesatuan dan persatuan bangsa dalam bentuk apresiasi yang tinggi terhadap keanekaragaman etnis dan budaya. Upaya pengembangan wacana asimilasi, walaupun masih harus dinilai menjadi prioritas agenda bagi industri media terutama sekali media televisi, selayaknya diperkaya dengan nuansa-nuansa pluralis dan multikulturalis.

Mencermati semakin maraknya tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang korban utamanya adalah perempuan, misalnya, dan juga maraknya tindak kriminal termasuk pencopetan maka nuansa pluralis dengan memberikan amplifikasi kepada ketegaran dan kegagahan perempuan barangkali masih sangat dibutuhkan. Selanjutnya penonjolan sifat-sifat inklusifitas, toleransi dan kerjasama selayaknya semakin memperoleh penonjolan pada paket tayangan televisi kita sekarang dan akan datang.

Daftar Pustaka

- Blumer, Jay G. and Wolfgang Hoffmann-Reim, "New Roles for Public Service Television" dalam Denis McQuail, 2002, *McQuail's Reader in Mass Communication Theory*, London: Sage Publications.
- Greenbaum, Susan D., 1994, "Multiculturalism" dalam Susan Averbach (ed). *Encyclopedia of Multiculturalism Vol. 4*. New York: Marshall Cavendish.
- Jones, Marsha and Emma Jones, 1999, *Mass Media*. London: Macmillan Press Ltd.
- Repstein, Arthur, 1998, "Multiculturalism" dalam Edwarg Craig (gen. ed.). *Routledge Encyclopedia of Philosophy Vol. 6*. London: Routledge.
- Richardson, John E. , "British Muslim in the Broad-sheet Press: a challenge to cultural hegemony?", *Journalism Studies Vol 2 No. 2*, 2001.
- Rinakit, Sukardi, "Politik Megalitikum Kuantum", Kompas 2 Juli 2005.